

Memutus Stagnasi Kemiskinan di Kepulauan Selayar



*Policy Brief ini ditulis oleh
Lisna Liana*

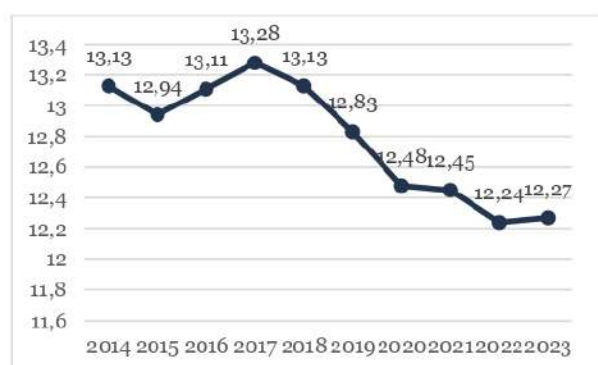
Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan, ditandai dengan stagnasi signifikan selama satu dekade (2014-2023) dengan penurunan persentase penduduk miskin hanya 0,86%. Pendekatan bantuan sosial yang selama ini diterapkan belum efektif mengatasi akar permasalahan, mengakibatkan dampak luas meliputi kesenjangan sosial-ekonomi, beban fiskal, penurunan kualitas SDM, dan hambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Policy brief ini merekomendasikan implementasi Program Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu sebagai solusi prioritas, meliputi: (1) pembentukan sentra ekonomi perikanan berbasis pulau, (2) penguatan rantai nilai produk perikanan, dan (3) peningkatan keterampilan masyarakat pesisir. Program ini ditujukan kepada Bappelitbangda dan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi maritim yang besar. Namun, potensi ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi kemiskinan. Selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan menunjukkan penurunan minimal sebesar 0,86%, mencerminkan adanya kendala struktural dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014-2023.



Tren lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Persentase penduduk miskin bergerak dari 12,83% (2019) ke 12,48% (2020), 12,45% (2021), mencapai titik terendah 12,24% (2022), namun kembali meningkat menjadi 12,27% (2023). Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan berbagai program bantuan sosial, pendekatan ini terbukti belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.	Ketergantungan pada bantuan sosial menjadi salah satu isu utama yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Isolasi geografis, kurangnya diversifikasi ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan menjadi tantangan tambahan yang dihadapi daerah ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk menjawab tantangan tersebut.
--	---

Deskripsi Masalah

Stagnasi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Ketergantungan pada bantuan sosial tanpa upaya pemberdayaan yang memadai menciptakan ketergantungan jangka panjang. Selain itu, penciptaan lapangan kerja produktif belum menjadi prioritas utama, sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan turut memperburuk situasi ini. Masyarakat di pulau-pulau kecil sering kali terisolasi dari akses pasar, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penghambat, dengan banyak rumah tangga yang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Situasi ini tidak hanya menyebabkan stagnasi ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan membatasi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Alternatif Solusi

Untuk mengatasi stagnasi ini, beberapa alternatif solusi dapat diusulkan:

1. Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu

Program ini bertujuan mengoptimalkan sektor perikanan melalui pembentukan sentra ekonomi berbasis pulau, penguatan rantai nilai produk perikanan, dan pelatihan keterampilan masyarakat pesisir. Dengan memanfaatkan potensi maritim, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Diversifikasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Mengadopsi konsep "*One Village One Product*" (OVOP), program ini berfokus pada pengembangan produk unggulan di setiap pulau, fasilitasi UMKM, serta branding dan promosi produk khas daerah. Langkah ini bertujuan menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

3. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kepulauan

Peningkatan akses antar-pulau melalui pembangunan pelabuhan, sistem logistik yang efisien, dan penyediaan energi terbarukan. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar arus barang dan jasa serta mengurangi kesenjangan harga antar-pulau.

4. Penguatan Modal Sosial dan Kelembagaan Ekonomi Lokal

Revitalisasi lembaga adat dan koperasi berbasis komunitas untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga melibatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

5. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Penyediaan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lokal untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar, direkomendasikan:

1. Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu dengan fokus pada pembentukan sentra ekonomi dalam 6-12 bulan, penguatan rantai nilai produk kelautan dalam 1-2 tahun, serta pelatihan keterampilan secara berkelanjutan.
2. Diversifikasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal melalui pengembangan produk unggulan dalam 6 bulan pertama, fasilitasi UMKM dalam 1 tahun, serta promosi dan branding produk lokal dalam 1-2 tahun.
3. Peningkatan Infrastruktur, Modal Sosial, dan Kualitas SDM yang dilaksanakan bertahap dalam 2-5 tahun untuk mendukung keberlanjutan dua program utama.

Daftar Pustaka

- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Reardon, T., et al. (2007). *Transforming the Rural Nonfarm Economy*. Johns Hopkins University Press.
- Suharto, E. (2015). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Suryahadi, A., et al. (2012). *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.
- World Bank. (2018). *Indonesia Economic Quarterly: Strengthening Competitiveness*.